

KUESIONER
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NOMOR 39 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA

Biro Hukum
Kementerian PPN/BAPPENAS

Jakarta, Oktober 2012

DATA RESPONDEN		
NAMA	:	
INSTANSI	:	
JABATAN	:	
TELEPON	:	
TANGGAL PENGISIAN	:	

KAJIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PP NOMOR 39 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Diskusi dan pengisian kuesioner ini difokuskan untuk pembahasan berkaitan dengan substansi (konten), maupun konteks atas PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Berdasarkan pengetahuan dan kepakaran yang dimiliki, Bapak dan Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan, maupun memberikan pernyataan yang merupakan eksplorasi lebih mendalam atas jawaban yang telah diberikan.

Sumbangan pemikiran dari Bapak dan Ibu akan sangat bermanfaat bagi kajian tingkat efektivitas pelaksanaan PP No. 39 Tahun 2006, dan menjadi salah satu masukan bagi perumusan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan

Kajian Efektivitas Pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006
Tentang
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Bapak dan Ibu dimohon mulai menjawab pertanyaan berikut ini

I. KESELARASAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Apakah Anda mengetahui adanya PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak, harap lanjut pada pertanyaan No 59	
2.	Sepanjang yang Anda ketahui, apakah ruang lingkup PP 39/2006 meliputi pengendalian dan evaluasi dana yang bersumber APBN dan APBD murni?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3.	Apakah Anda mengetahui, adanya peraturan perundang-undangan lain yang juga mewajibkan Aparatur (pelaku pembangunan) untuk membuat pelaporan dalam rangka pengendalian dan evaluasi?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak, harap lanjut pada pertanyaan nomor 7	
4.	Jika jawaban anda pada nomor 3 adalah YA, Berapa banyak peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Aparatur (pelaku pembangunan) untuk membuat laporan dalam rangka pengendalian dan evaluasi?	
	<input type="checkbox"/> 1 (satu) <input type="checkbox"/> 2 (dua)	<input type="checkbox"/> 3 (tiga) <input type="checkbox"/> Lebih dari 3 (tiga)
5.	Menyambung jawaban pertanyaan nomor 3 dan 4. Mohon sebutkan peraturan tersebut (jika memungkinkan mohon sebutkan jenis peraturan nomor dan tahun)	
	1.	, bentuk laporan
	2.	, bentuk laporan
	3. (jika terdapat lebih dari 3 peraturan mohon dituliskan dihalaman kosong)	, bentuk laporan
6.	Menyambung jawaban pertanyaan nomor 4, 5 dan 6. Menurut Anda, bagaimanakah hubungan antar peraturan-peraturan tersebut?	
	<input type="checkbox"/> Selaras dan saling melengkapi <input type="checkbox"/> Merupakan duplikasi yang seharusnya dapat diintegrasikan <input type="checkbox"/> Tumpang tindih dan tidak selaras	
7.	Menurut Anda, apakah ada pelaporan yang lebih penting dan didahulukan daripada pelaporan PP 39/2006?	
	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
8.	Jika jawaban anda pada nomor 7 adalah ADA, mohon disebutkan secara beurutan.	
	1.	

		2.
		3.
09.	Menurut Anda, apakah seluruh SKPD di Provinsi mengetahui adanya PP 39/2006?	
	<input type="checkbox"/> Tahu <input type="checkbox"/> Tidak Tahu	
10.	Menurut Anda, apakah seluruh SKPD di Kabupaten/Kota mengetahui adanya PP 39/2006?	
	<input type="checkbox"/> Tahu <input type="checkbox"/> Tidak Tahu	
II. MUNCULNYA EKSTERNALISASI (PERILAKU DAMPAK) NEGATIF		
11.	Menurut Anda, apakah kewajiban yang diatur PP 39/2006 merupakan beban kerja tambahan yang harus dilakukan oleh instansi/unit kerja Anda?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
12.	Dalam praktek selama ini hal apakah yang paling diutamakan dalam menyusun laporan berdasarkan PP 39/2006?	
	<input type="checkbox"/> sekedar menyampaikan laporan tepat waktu <input type="checkbox"/> sekedar menyampaikan laporan tanpa memperhatikan waktu <input type="checkbox"/> menyampaikan laporan dengan memperhatikan kualitas isi laporan tanpa memperhatikan waktu <input type="checkbox"/> menyampaikan laporan dengan memperhatikan kualitas isi laporan memperhatikan tepat waktu	
13.	Menyambung jawaban pertanyaan nomor 12 Mohon sebutkan alasan jawaban Anda	
	1.	
	2.	
	3.	
III. KETERSEDIAAN SDM/KOMPETENSI		
14.	Apakah Instansi Anda memiliki jumlah SDM yang cukup untuk menyusun laporan berdasarkan PP 39/2006?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika tidak, sebutkan alasannya 1. _____ 2. _____ 3. _____	
15.	Apakah SDM yang ditugaskan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menyusun laporan?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
16.	Apakah SDM yang ditugaskan untuk menyusun laporan hanya bertugas melaksanakan aktifitas tersebut tanpa ada kewajiban melaksanakan tugas-tugas rutin lainnya?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

17.	Jika jawaban Anda pada nomor 16 adalah <i>TIDAK</i> , berapa perkiraan prosentase beban kerja melaksanakan menyusun laporan PP 39/2006 dibandingkan tugas-tugas rutin lain?	
	<input type="checkbox"/> 20% - 80% <input type="checkbox"/> 40% - 60%	<input type="checkbox"/> 50% - 50% <input type="checkbox"/> 60% - 40% <input type="checkbox"/> 80% - 20%
18.	Apakah instansi Anda melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi staf terkait dengan PP 39/2006?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
19.	Jika jawaban Anda pada nomor 18 adalah <i>YA</i> , mohon sebutkan kegiatan apa.	
	1.	
	2.	
	3.	
IV. KEJELASAN MEKANISME/PROSES BISNIS		
20.	Menurut Anda, apakah mekanisme pelaporan yang diatur dalam PP 39/2006 sudah cukup jelas?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
21.	Menurut Anda, apakah mekanisme pelaporan yang diatur dalam PP 39/2006 mudah dilaksanakan?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
22.	Menurut Anda, apakah diperlukan aturan teknis/operasional yang lebih rinci untuk menindaklanjuti aturan yang diatur dalam PP 39/2006?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
23.	Apakah Instansi Anda memiliki mekanisme untuk mengkoordinasikan penyusunan laporan PP 39/2006?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Apabila Ya, Bentuk mekanismenya seperti apa? 1. _____ 2. _____ 3. _____	
V. TUGAS DAN FUNGSI (KEWENANGAN) PARA PIHAK DIURAIKAN DENGAN JELAS DAN TERUKUR		
24.	Menurut Saudara, apakah ada pihak lain yang harus diatur di dalam PP 39/2006 selain Bappenas, Kementerian/Lembaga, Bappeda Provinsi, Bappeda Kab/Kota, Gubernur, Bupati/Walikota, SKPD?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

25.	<i>Jika jawaban anda pada angka 24 adalah YA, mohon sebutkan siapa dan apa perannya.</i>	
	1.	
	2.	
	3.	
26.	<i>Jika jawaban anda pada angka 24 adalah TIDAK, apakah pengaturan para pihak serta uraian tugas dan fungsinya dalam PP 39/2006 sudah jelas dan tidak menimbulkan konflik/perbedaan pengertian?</i>	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
VI. RUMUSAN SUBSTANSI JELAS DAN DAPAT DIMENGERTI		
27.	Berapa kali saudara membaca PP 39/2006?	
	<input type="checkbox"/> 1 (satu) kali <input type="checkbox"/> 2 (dua) kali	<input type="checkbox"/> 3 (tiga) kali <input type="checkbox"/> Lebih dari 3 (tiga)
28.	Menurut Anda, apakah pasal-pasal dalam PP 39/2006 mudah dipahami?	
	<input type="checkbox"/> Mudah <input type="checkbox"/> Sulit	
29.	Apakah Anda pernah membaca/menemukan pasal dalam PP 39/2006 yang rumusannya tidak jelas?	
	<input type="checkbox"/> Pernah <input type="checkbox"/> Tidak pernah	
30.	<i>Jika jawaban Anda pada nomor 29 PERNAH, mohon sebutkan Pasal tersebut</i>	
	1. _____	
	2. _____	
	3. _____	
31.	Apakah Anda pernah menemukan dalam PP 39/2006, suatu pasal bertentangan dengan pasal yang lain?	
	<input type="checkbox"/> Pernah <input type="checkbox"/> Tidak pernah	
32.	<i>Jika jawaban Anda pada nomor 31 PERNAH, mohon sebutkan Pasal tersebut.</i>	
	1. _____ bertentangan dengan _____	
	2. _____ bertentangan dengan _____	
	3. _____ bertentangan dengan _____	
33.	Menurut Anda, apakah urutan pasal-pasal dalam PP 39/2006 sudah sistematis?	
	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum	
VII. MEKANISME IMPLEMENTASI		
34.	Apakah di Instansi Anda, yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan laporan PP 39/2006 merupakan pejabat dengan eselonisasi tertentu?	
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
35.	<i>Jika jawaban anda pada nomor 34 adalah YA, sebutkan eselonisasi tersebut.</i>	
	<input type="checkbox"/> Eselon II <input type="checkbox"/> Eselon III <input type="checkbox"/> Eselon IV	

36.	Apakah di instansi Anda, laporan PP 39/2006 dibuat oleh satu orang atau Tim?
	<input type="checkbox"/> Satu orang <input type="checkbox"/> Tim
37.	Jika jawaban anda pada nomor 36 adalah Tim, berapakah jumlah anggota Tim tersebut?
	<input type="checkbox"/> 2 (dua) orang <input type="checkbox"/> 3 (tiga) orang <input type="checkbox"/> 4 (empat) orang <input type="checkbox"/> Lebih dari 4 (empat) orang
38.	Apakah dalam penyusunan laporan PP 39/2006, Anda menggunakan aplikasi elektronik PP 39/2006?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
39.	Jika jawaban No. 38 tidak, mohon sebutkan alasannya. 1. _____ 2. _____ 3. _____
40.	Menurut Anda, apakah pengisian aplikasi elektronik PP 39/2006 merupakan hal yang mudah?
	<input type="checkbox"/> Mudah <input type="checkbox"/> Sulit
41.	Menurut Anda, apakah aplikasi elektronik PP 39/2006 terlalu banyak angka/kode yang harus diisi?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
42.	Apakah perintah dalam aplikasi elektronik PP 39/2006 mudah dipahami?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak, sebutkan alasannya
VIII. FEEDBACK FOR IMPROVEMENT	
43.	Apakah Anda pernah berkonsultasi mengenai cara pengisian PP 39/2006 ke Bappenas?
	<input type="checkbox"/> Pernah <input type="checkbox"/> Tidak Pernah
44.	Apakah Anda pernah menyampaikan permasalahan dalam melaksanakan PP 39/2006 ke Bappenas?
	<input type="checkbox"/> Pernah <input type="checkbox"/> Tidak Pernah
45.	Jika jawaban pertanyaan 44 pernah, Apakah Anda pernah mendapat tanggapan dari Bappenas setelah menyampaikan permasalahan?
	<input type="checkbox"/> Pernah <input type="checkbox"/> Tidak Pernah
46.	Apakah setelah Anda menyampaikan permasalahan, ada perbaikan yang dilakukan oleh Bappenas?
	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
47.	Apakah anda memandang perlu adanya <i>feedback</i> /tanggapan dari Bappenas atas laporan yang telah anda sampaikan?
	<input type="checkbox"/> Perlu

		<input type="checkbox"/> Tidak
IX. KEUNTUNGAN BILA MENTAATI		
48.	Menurut Anda, apakah implementasi PP 39/2006 memberikan dampak positif bagi kepentingan Instansi Anda?	
		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
49.	Apakah hasil laporan PP 39/2006 telah dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja instansi anda?	
		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak , sebutkan alasannya
50.	Menurut Anda, apakah pelaporan, pengendalian dan evaluasi dalam PP 39/2006 merupakan hal penting sebagai satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan?	
		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
X. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI		
51.	Menurut Anda, dalam rangka meningkatkan kepatuhan K/L, apakah implementasi PP 39/2006 perlu dikawal/dikontrol oleh Bappenas?	
		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
XI. SANKSI DAN PENGHARGAAN		
52.	PP 39/2006 tidak memuat ketentuan tentang sanksi. Menurut Anda apakah hal ini merupakan salah satu sebab ketidakpatuhan K/L menyampaikan laporan berdasarkan PP 39/2006?	
		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
53.	Menurut Anda, apakah dalam mekanisme implementasi PP 39/2006 perlu dilengkapi dengan sanksi?	
		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
54.	<i>Jika jawaban Anda pada nomor 53 adalah YA, mohon sebutkan sanksinya apa?</i>	
		1.
		2.
		3.
55.	Menurut anda apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan kepatuhan K/L menyampaikan laporan?	
		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
56.	<i>Jika jawaban Anda pada nomor 55 adalah YA, mohon sebutkan penghargaan apa?</i>	
		1.
		2.
		3.

XII. UPAYA PENTAATAN MELALUI KOMUNIKASI	
57.	PP 39/2006 tidak mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Saudara, apakah dengan cara menyampaikan surat teguran kepada instansi yang tidak menyampaikan laporan, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan melaksanakan PP 39/2006?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
58.	PP 39/2006 tidak mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Saudara apakah dengan cara mengumumkan instansi yang tidak menyampaikan laporan dalam website resmi, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan melaksanakan PP 39/2006?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
XIII. SOSIALISASI	
59.	Apakah pernah ada sosialisasi PP 39/2006 di instansi Anda yang dilakukan oleh Bappenas atau instansi lainnya?
	<input type="checkbox"/> Pernah <input type="checkbox"/> Tidak Pernah (jika pilihan jawaban Anda TIDAK PERNAH, maka lanjut ke nomor 63)
60.	Menurut Anda, apakah sosialisasi yang dilakukan Bappenas membantu/ mempermudah Anda untuk mengisi aplikasi dalam PP 39/2006?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
61.	Apakah sosialisasi PP 39/2006 diikuti dengan praktek pengisian aplikasi PP 39/2006?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
62.	Pada waktu sosialisasi, apakah pengisian formulir PP 39/2006 dilakukan secara aktif oleh seluruh peserta atau hanya oleh Bappenas?
	<input type="checkbox"/> Oleh seluruh peserta <input type="checkbox"/> Oleh Bappenas
XIV. INTERNALISASI	
63.	Apakah frekuensi fasilitasi dan bimbingan teknis terkait implementasi PP 39/2006 cukup diberikan oleh Bappenas kepada instansi Anda dan/atau staf Anda.
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
64.	Apakah fasilitasi dan bimbingan teknis terkait implementasi PP 39/2006 cukup diberikan oleh Bappenas kepada instansi Anda dan/atau staf Anda dari aspek substansi.
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
65.	Apakah instansi Anda memerlukan kegiatan internalisasi PP 39/2006?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
66.	Saran perbaikan apa yang anda usulkan untuk perbaikan efektifitas pelaksanaan PP 39/2006?
	1.
	2.
	3.

Terimakasih atas sumbangan pemikiran Bapak dan Ibu dalam kajian "Efektivitas Pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, tentang: Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan".

Jakarta, Oktober 2012
Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS